

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ridwan Halim, *Evauasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1987.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 1992.
- Abu Rokhmad, *Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- _____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2017.
- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Algra N.E et.al, *Mula Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Aminuddin, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, 2009.

- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*. 1998.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement dalam kejahatan Bisnis*, Kompas, Gramedia, Jakarta, 2019
- Beni kurnia illahi, *Fakultas Hukum Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan Dan Pengendalian Benturan Kepentingan Di Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu Yang Menyalin Dari Transparency International Indonesia, Naskah Akademik Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Konflik Kepentingan Di Perguruan Tinggi Negeri*, Transparency International Indonesia, Jakarta, 2018.
- Bibit S. Rianto dan Nurlis E, Meuko, *Koruptor, Go To Hell! (Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia)*, Hikmah, Jakarta, 2009.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal. 20.
- Cindy R. Alexander dan Mark A. Cohen, *Non-Prosecution, Deffered Prosecution, and Plea Agreements in the Settlement of Alleged Corporate Criminal Wrongdoing*, Law and Economic Center of George Mason University School of Law, Fairfax, 2015.
- Cole, George F., Christopher E. Smith, and Christina DeJong, *The American system of criminal justice*. Cengage Learning, 2018.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Donal Fariz, *Proyek Ambisius Pembentukan Pengadilan Tipikor, dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- E. Surmayono, *Etika dan Hukum; Relevansi hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

- Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi Dinemika Pemerintahan (Aplikasi Dalam Ptun)*, Yogyakarta, 2016.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- F. M. Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pertama*. Sinar Grafika Offset, Jakarta Timut, 2019.
- George F.Cole, *The Maerican System Criminal Juctice*.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi*, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007.
- _____, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Judul Asli: General Theory of Law and State, Alih Bahasa Somardi, Bee Media, Jakarta, 2007.
- _____, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hans Kelsen dalam jilmy Ashidiqqie, “Perihal Undang-Undang”, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010.
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur, 1994.
- Harry C. Credemier, *The analysis Of Social System*, Holt, Rainhart And Winston, Newyork, 1962.
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing Co., St.Paul. Minn, 1990.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hanafi Amrani dkk, *Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Hulma Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Penemuan Hukum Melalui Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Jenia I. Turner. *Plea Bargaining Across Borders*,: Aspen, New York, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2008.
- _____, dalam HM Ali Masyur, *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Unnisula Press, Semarang, 2010.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, Mei 2006.
- _____, *A Theory of Justice*, The President and Fellowship of Harvard University Press. New York, 1999.
- _____, *Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- KPK, *Buku Saku Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016,
- Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning, Inc, USA, 2007.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwil di Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta, 1991

- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2011.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2013
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Budaya Laten Korupsi*, IGM, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, et. al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreement: The Law And Practice Of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Thomson Reuters, London, 2011.
- Polly Sprenger, *Deferred prosecution agreements: The law and practice of negotiated corporate criminal penalties*, 2015.
- Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1986.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ramadhan, Choky Risda. *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*. 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Ridwan HR., *Hukum administrasi Negara*, Rajawali Pers, Cet. XII, Jakarta, 2016.
- Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2006.
- _____, *Hukum dan Perilaku* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010,.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Shinta Agustina, *Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, JiEP, Jakarta.
- Sinaga, Japansen, et al. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.

Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991,

_____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 1993.

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.

Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, P.T. Bale Bandung, Bandung, 1981.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

B. Disertasi

Abdur Kadir, Fungsi Jaksa Dalam Politik Hukum Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 2021

Hendri Edison, Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Zaenudin, Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

C. Jurnal

Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam jurnal. untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4242/31

- Adhalia Septia Saputri, "The Urgency and Mechanism of Asset Return for Corruption Crimes" *International Journal of Social Service and Research*, Vol 3 No 4 (2023): 906
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.1, No.2, 2017.
- Asep Nana Mulyana, "Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Concept In The System Of Criminal Jurisdiction In Indonesia" *Webology* (2021): 3035
- Bambang Hartono, "Efforts to Return State Asset Losses in Corruption Offenses from Abroad to Indonesia" *Pena Justitia*, Vol 20 No 1 (2021): 153
- Branislav Hock, Dávid-Barrett, Elizabeth. The compliance game: Legal endogeneity in anti-bribery settlement negotiations. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2022.
- Bu Qingxiu, "The Viability of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the UK: The Impact on Global Anti-Bribery Compliance", *European Business Organization Law Review*, Vol 22 Issue 1 (2021): 173-201. <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00203-5>
- Cindy Alexander & Mark Cohen. "The Evolution of Corporate Criminal Settlement: An Empirical Perspective on Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements" *The American Criminal Law Review*, Vol 52 Issue 3 (2015): 537-593
- Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undangundang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020), Vol 2, No 1, 2022
- Didit Prihantoro, Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif. *Transparansi Hukum*, 2020.
- Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*'' Jurnal Hukum.
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2009.

- Eddy Omar Sharif Hiariej, 2019, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1.
- Elizabeth Ghozali, et al. Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 2016.
- Ellis Martin, "Deferred Prosecution Agreements: Too Big to Jail and the Potential of Judicial Oversight Combined with Congressional Legislation" *North Carolina Banking Institute*, Vol 18 Issue 2 (2014): 457–480
- Erna Febriani, et al. Negosiasi Terpadu Sebagai Strategi Penanganan Aksi Massa (Studi Kasus Penanganan Aksi Mahasiswa "Korupsi Reformasi" Oleh Lembaga Kepolisian). *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2022.
- Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, 2008.
- Famda Egga Prasnada, dkk, "Status of Pretrial Institutions in Indonesia Criminal Law" *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol 3 Issue 1 (2023): 99
- Fathoni, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan Tantangan Negara Kesejahteraan", Jurnal Penelitian Hukum Supermasi Hukum, Vol. 24, No. 2, 2015.
- Febby Mutiara Nelson, "In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia" *Hasanuddin Law Review*, Vol 8 No 2 (2022): h. 126. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292>
- Fuzi Narindrani, *Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. Penelitian Hukum De Jure*, 2020.
- Gde Made Swardhana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Gibson Dunn, "2010 Year-End Update on Corporate Deferred Prosecution And on rosecution Agreements," 4 Januari 2011.
- Grasso Costantino, "Peaks and Trhoughs of the U.K. Deffered Prosecution Agreement: The Lesson Learned from the First-Ever DPA between the SFO and ICBC SB PLC, *Journal of Bussines Law*, Paper No. 223 (2016): 1
- Gregory B. Turner, G. Stephen Taylor, dan Mark F. Hartley, "Ethics, Gratuities, and Professionalization of the Purchasing Functio," *Journal of Business Ethics*, Vol. 14 No. 9, September 1995, New York: Springer.
- Habi Burrohim, I. Gede Widhiana Suarda, dan Azizah, Ainul. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. *Jurnal Rechtens*, 2022.

- Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*, Jurnal Litigasi Vol. 16 (2), 2015.
- Helena Hestaria, at. al., Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2022.
- I. Gede Artha, and Ni Nengah Adiyaryani. 2020, "The Role of the Prosecutor in Executing the Payment of Replacement Money." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3.
- I. M. Santiawan and G. M. Swardhana, Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *J. Kertha Semaya*, vol. 9, no. 6, pp. 1044–1052, 2021
- Ibnu Kholik, "Confiscation of Personal Assets of Corruption Defendants in a Positive Legal Perspective" *KnE Social Sciences*, Vol 2024, h.359-373
- Jamin Ginting, "Assets Recovery Principles in the United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNAC 2003) to Support Corruption Eradication in Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 8 Number 3 (2011): 448
- Januarsyah, at al, "The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001: 2016)." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2021): 232
- Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, et al. Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, 2021.
- Lilik Mulyadi, 2015, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, no. 1.
- M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- MaPPI FH-UI, *Media Hukum dan Keadilan*, Vo 1 No 8, Oktober 2002.

- Maramis, Junaidy. Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 2022.
- Maria Nizzero, “Exploring Mechanisms for the Return of Proceeds Corruption” *Royal United Service Institute for Defence and Security Studies*, (2023): 1
- Michael Bisgrove and Mark Weekes, “Deffered Prosecution Agreements: a Practical Consideration”, *Criminal Law Review*, Issue 6 (2014): 4
- Midian Hosiholan Rumahorbo, “The Role of Prosecutors in The Effort For Assets Recovery From Corruption Crimes”, *Ius Poenale*, Vol 3 Issue 2 (2022): 81-92
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mudzakkir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)*, <https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.360>
- Nicholas Lord, “Prosecution Deferred, Prosecution Exempt: On the Interests of (In)Justice in the Non-Trial Resolution of Transnational Corporate Bribery” *The British Journal of Criminology*, Vol 20 Issue 20 (2022): h. 4
- Pranoto, Agus, Abadi B. Darmo, and Iman Hidayat. Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum* 10.1, 2019
- Putu Eva Ditayani Antari, and I. Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana. Deferred Prosecution Agreement dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.1, 2023
- Putu Eva Ditayani Antari, Menyoal Deferred Prosecution Agreement sebagai Gagasan Baru Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 12 Nomor 1 Januari-Juni 2023
- Rahmayanti, “Return of Corruption Assets toward Criminal Actions of Office Abuse” *Budapest International Research and Critics Intitute*, Vol 4 No 2 (2021): 2114-2120 <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1901>
- Randall G. Holcombe dan Christopher J. Boudreaux, “Regulation and corruption,” *Public Choice*, Vol. 164, No. 1 (2015): 5

- Ratna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Jurnal Core.ac.id.
- Ronald Dworkin, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht: Netherland, 1990.
- Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance In Times Of Economic Meltdown," *The Journal fo Social Justice*, Vol.2 (2011)
- Shinta Agustina, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, Ariehta Eleison Sembiring, *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, LeIP, 2019
- Sinaga, Muhammad Ridho. Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- Sudjana, *Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ketahanan Nasional, 2018.
- Suhariyanto, Budi. Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan Tun Dan Pengadilan Tipikor/Interception Of Justice Authority Of Discretion Abuse Between Administration Court And Corruption Courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018.
- Sukamto Satoto, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Penetapan Tersangka, *Keterangan Ahli Kasus Praperadilan*, Pengadilan Negeri tebo, 13 November 2017
- Tiranda Irianto; Puluhulawa, Fenty; Jasin, Johan. Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 2019, 1.2.
- U Myint, "Corruption: Causes, Consequences and Cures" *Asia-Pacific Development Journal*, Vol 7 No 2 (2000): 35
- Wahyu Nugroho, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah. *Jurnal Yudisial*, 2014.
- Wray, Christopher A. dan Robert K. Hur, "Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: the Thompson Memo In Theory And Practice," *American Criminal Law Review*, Vol.43, (2006).
- Yusnus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.

Ziyad, Ziyad. Konsep Plea bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara. *Badamai Law Journal*.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Keuda Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt tanggal 27 November 2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBI, 21 Desember 2017.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

Putusan PT Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Putusan Mahkamah Agung No. 397 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

E. INTERNET

Beritagar.id. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun:
<https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negaraakibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun>.

Carolyn E. Damarest, dikutip dalam Dimas Prasidi, Plea Bargaining, sebuah jalan permisif bagi keadilan, artikel, www.scholarship.law.berkeley.edu

Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/09/114-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sejak-2004-2019>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>

<https://www.bpk.go.id/news/total-loss-kasus-hambalang-rp46366-miliar>

<https://news.detik.com/berita/d-6340529/lelang-kpk-banting-harga-paket-mobil-mewah-puluhan-juta-saja/3>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-Negara-akibat-Korupsi-rp629-triliun-pada-2021>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-Korupsi-hanya-2-dari-kerugian-Negara>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/berapa-anggaran-lembaga-penyidiktindak-pidana-Korupsi-di-indonesia>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-Korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/> 65 persen tindak pidana korupsi yang ditangani kpk merupakan kasus penyuapan, diakses tanggal 6 November 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi, K. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018. Diakses pada 07 Agustus 2023, 2018.
<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/934-laporan-tahunan-kpk2018>

Philadelphia Magazine. <http://www.phillymag.com/news/2014/08/07/chakafattah-jr-turned-plea-deal-likes-16-rock-shrimp-pod/>

Satjipto Rahardjo, “Arsenal Hukum Progresif “dalam <http://ejournal.undip.ac.id>

The Daily Center. <http://dailycaller.com/2017/06/29/philadelphia-dasent-to-jail-after-admitting-to-accepting-bribes/>.

United States of Department of Justice. <https://www.justice.gov/usao-nj/pr/philadelphiadistrict-attorney-rufus-seth-williams-pleads-guiltyfederal-bribery-charge>